

Proyek Perubahan Iklim Belum Utamakan Perempuan

Sejumlah proyek yang dilakukan untuk mengatasi masalah perubahan iklim saat ini dinilai belum menjawab persoalan perempuan. Bahkan, proyek dengan dana internasional tersebut semakin meminggirkan perempuan. Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan Risma Umar, dalam siaran pers kepada *Jurnal Nasional*, Sabtu (23/4), mengatakan, walau mengadopsi kata keadilan gender, tapi proyek-proyek seperti Strategi Nasional pengurangan emisi deforestasi dan degradasi hutan (REDD) belum memiliki strategi yang jelas.

"Kebijakan dan proyek perubahan iklim yang ada masih belum berpihak kepada kepentingan perempuan, seperti misalnya di dalam Stranas REDD," katanya. Walaupun program REDD itu belum disahkan, katanya, tetapi saat ini begitu banyak proyek yang mengarah pada REDD dan CDM, seperti FIP (Forest Investment Program) yang akan didanai oleh ADB, Program HTI yang didanai oleh IFC, dan beberapa proyek lainnya telah dilakukan di beberapa daerah seperti Papua, Sulawesi, Kalimantan, dsb.

Bahkan tidak sedikit proyek-proyek perubahan iklim tersebut menggunakan dana utang luar negeri. Hasil pantauan CFAM bahwa hutang proyek iklim mencapai US\$400 juta, sementara utang program US\$1,9 miliar. Jumlah keseluruhan adalah US\$2,3 miliar dari berbagai sumber. Ia mengatakan, *pilot project* REDD banyak menimbulkan permasalahan, seperti proyek HTI PT Musi Hutan Persada (PT MHP) di Sumatera Selatan, proyek REDD di Ulu Masen-Aceh, dan proyek konservasi PT REKI di Jambi, yang mengakibatkan konflik lahan hingga kriminalisasi warga dan aktivis, termasuk perempuan.

"Permasalahan ini terjadi karena selama ini tidak ada aturan perlindungan bagi masyarakat terutama perlindungan perempuan sebagai acuan kebijakan maupun proyek iklim yang akan dilakukan," ujarnya.